



PENGARUH PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Muhammad Iqbal & Sukma Juniar

*Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung, Bandung,
Jawa Barat, Indonesia*

Received: 20 Juni 2020; Revised: 1 Juli 2020; Accepted: 3 Juli 2020; Published: Juli 2020; Available online: Juli 2020.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial maupun simultan di Kabupaten Bandung Periode 2011-2018. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dibuktikan dengan hasil uji t dimana t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} ($0,802 < 2,570$) atau nilai signifikansi ($0,459 > 0,050$). Kemudian Pajak Air Tanah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini dibuktikan dengan hasil uji t dimana t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($2,967 > 2,570$) atau nilai signifikansi ($0,031 < 0,050$). Hasil uji F diperoleh F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} ($12,627 > 5,79$) atau nilai signifikansi ($0,011 < 0,050$). Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwasecara simultan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

Kata Kunci :Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah, dan Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki sumber-sumber

pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-

tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur, salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah berperan penting untuk membiayai seluruh anggaran belanja pemerintah daerah dengan menggali sumber penerimaan dari sektor pajak, oleh sebab itu wajib pajak baik perorangan atau badan, wajib melaporkan pendapatannya demi kelangsungan pembangunan serta meningkatkan pendapatan daerahnya, dan yang menjadi sumber pendapatan daerah diantaranya ialah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak air tanah.

Kabupaten Bandung yang merupakan daerah otonom, berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Dan pendapatan asli daerah berperan penting untuk membiayai seluruh anggaran belanja pemerintah daerah dengan menggali sumber penerimaan dari sektor pajak, oleh sebab itu wajib pajak baik perorangan atau badan, wajib melaporkan pendapatannya demi kelangsungan pembangunan serta meningkatkan pendapatan daerahnya, dan salah satu yang menjadi sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 tahun

2016 Bab 1 Pasal 1 disini disebutkan pula bahwa ada 11 jenis pajak daerah terdiri dari, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam, pajak sarang burung walet, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Namun penulis tertarik meneliti pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak air tanah, karena dilihat dari tahun ke tahun semakin banyaknya pembangunan property di Kabupaten Bandung. Besarnya minat masyarakat untuk memiliki aset berupa tanah dan bangunan berdampak terhadap besarnya Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi yang terjadi, Adanya transaksi BPHTB tersebut akan meningkatkan pendapatan pajak. Begitupun dengan pajak air tanah banyaknya perusahaan industri di kabupaten bandung yang memakai air bawah tanah sebagai bahan untuk berjalannya perusahaan akan berdampak terhadap besarnya pajak air tanah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Penerimaan BPHTB dan Pajak Air Tanah yang masih dibawah potensi sebenarnya ini dapat dikarenakan masih adanya BPHTB dan Pajak Air Tanah yang belum tertagih atau wajib pajak

yang masih menunggak pembayaran pajak. BPHTB dan Pajak Air Tanah yang belum tertagih atau menunggak karena kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak.

Menurut peraturan daerah kabupaten bandung nomor 01 tahun 2011 pasal 1 ayat 32 bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dengan ditetapkan BPHTB menjadi pajak daerah diharapkan mampu meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dan menambah secara signifikan pendapatan asli daerah.

Menurut peraturan daerah kabupaten bandung nomor 01 tahun 2011 pasal 1 ayat 24 pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pajak air tanah mampu memaksimalkan potensinya untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerimaan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung."

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011- 2018.
2. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2011-2018.
3. Bagaimana pengaruh penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011-2018.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli

Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta menganalisis:

1. Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pengaruh Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
3. Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (1). Bagi Instansi: Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan lembaga pemerintahan Kabupaten Bandung khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bandung. (2). Bagi Perguruan Tinggi: Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat

digunakan sebagai referensi dalam penelitian dan analisis yang sejenis.

Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pengertian Akuntansi

Menurut Drs. Mursyidi (2010:17) dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Dasar*, mendefinisikan bahwa :

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan memproses pengolahan dan penganalisaan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Menurut Firdaus (2009) dalam bukunya yang berjudul *“Pengantar Akuntansi”* mendefinisikan bahwa :

“Akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi. Akuntansi menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai, bagi pihak-pihak intern atau yang mengelola perusahaan dan pihak-pihak luar perusahaan.”

Pengertian Laporan Keuangan

Menurut R Warner Murhadi dalam buku Analisis Laporan Keuangan (2013: 1) mendefinisikan laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan merupakan bahasa bisnis, didalam laporan keuangan berisi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak pengguna. Dengan memahami laporan keuangan suatu perusahaan, maka berbagai pihak yang berkepentingan dapat melihat dapat melihat kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan.”

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:2) dalam bukunya yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan” mendefinisikan bahwa:

“Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.”

Menurut Hery dalam bukunya (2013: 7) yang berjudul “Teori Akuntansi Suatu Pengantar” menjelaskan bahwa:

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan/aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Definisi BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab 1 pasal ayat 41 - 42 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah :

“Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, selanjutnya disebut pajak.”

Menurut Suparmono dan Theresia Woro Damayanti (2010) dalam bukunya perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan, menjelaskan bahwa:

“Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan”.

Selanjutnya menurut Waluyo (2007: 155) dalam

bukunya perpajakan indonesia, menjelaskan bahwa:

“Pemilik atau yang memperoleh Hak Atas Tanah dan Bangunan menyerahkan sebagian nilai ekonomis yang diperoleh kepada pemerintah melalui pembayaran pajak yang disebut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).”

Pajak Air Tanah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2011 pasal 1 ayat 24 menyebutkan bahwa :

“Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.”

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 angka 33 menyebutkan bahwa :

“Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. sedangkan yang dimaksud air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.”

Definisi pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 adalah:

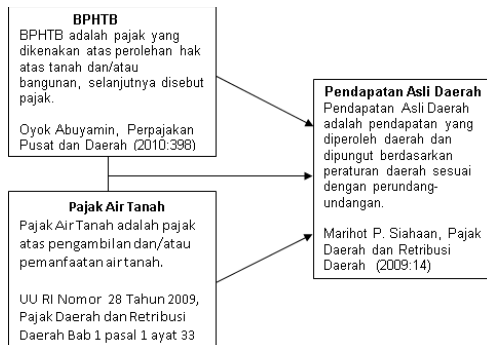
“Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Marihot P. Siahaan dalam bukunya Pajak Daerah & Retribusi Daerah (2009: 14) menjelaskan bahwa:

“Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, termasuk hasil dan pelayanan badan umum (BLU) daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan lain-lain PAD yang sah.”

Pendapatan Asli Daerah

Muhammad Iqbal & Sukma Juniar, Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung



penelitian yang akan di teliti, dimana dalam objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan disajikan dalam penelitian untuk dicari pemecahannya.

Menurut Sugiyono (2012:13) menyebutkan bahwa pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut:

"Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)."

Objek penelitian dalam artikel ini adalah pengaruh BPHTB dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Sumber data yang diperlukan adalah Laporan Keuangan Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 2011 sampai 2018.

Menurut Sugiyono (2017:2) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bisnis menyebutkan bahwa pengertian metode penelitian adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan konsep hipotesis dan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Diduga Terdapat pengaruh Penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung periode 2011-2018.
2. Diduga Terdapat pengaruh Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung periode 2011-2018.
3. Diduga Terdapat pengaruh Penerimaan BPHTB dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung periode 2011-2018.

Objek dan Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, yang pertama kali harus diperhatikan adalah objek

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Metode penelitian ini meliputi model dan operasionalisasi variabel, dimana model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian deskriptif dan verifikatif yaitu untuk mengetahui perkembangan dan pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama.

Sedangkan operasionalisasi variabel merupakan definisi mengenai variabel-variabel penelitian yang diambil dari teori kepustakaan dan merupakan teori penghubung dari judul yang diteliti, sebagai berikut :

Tabel Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator Variabel	Skala
Variabel bebas (X_1): BPHTB	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, selanjutnya disebut pajak. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 huruf a tentang Perolehan Atas Tanah dan Bangunan)	a. Pemindahan hak karena : 1) Jual beli; 2) Tukar menukar; 3) Hibah; 4) Hibah Wasiat; 5) Waris; 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8) Penunjukan pembeli dalam lelang; 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10) Penggabungan usaha; 11) Peleburan usaha; 12) Pemekaran usaha; atau 13) Hadiah; b. pemberian hak baru karena : 1) Kelanjutan pelepasan hak; atau 2) Diluar pelepasan hak. 1. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka (1) tersebut diatas adalah : a. Hak Milik; b. Hak Guna Usaha; c. Hak Guna Bangunan; d. Hak Pakai; e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan f. Hak pengelolaan. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab II pasal 85 ayat 2)	Rasio
Variabel bebas (X_2): Pajak Air Tanah	Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. (Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2011 pasal 1 ayat 24)	Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pengambilan dan/atau pemanfaatan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran. (Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2011 ayat 26)	Rasio
Variabel Terikat (Y) : Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut	a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan	Rasio

a. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, untuk mengetahui keadaan naik turunnya variabel yang diteliti.

Begitupun seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyono (2017:275) dalam bukunya “Metode Penelitian Bisnis” yang menjelaskan bahwa :

“Analisis regresi ganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel independen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik/turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2”.

Bila dijabarkan secara matematis, bentuk persamaan dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y = Variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah)

X₁ = Variabel bebas (BPHTB)

X₂ = Variabel bebas (Pajak Air Tanah)

a = Bilangan konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X₁, X₂ = 0

b₁, b₂ = Koefisien regresi

Analisis Koefisien Korelasi

Korelasi pada dasarnya merupakan nilai yang menunjukkan tentang adanya

hubungan antara dua variabel atau lebih serta besarnya hubungan tersebut. Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara X₁ dan X₂ terhadap Y. Analisis koefisien korelasi meliputi koefisien korelasi parsial dan koefisien korelasi ganda.

Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi ganda (R) diketahui serta untuk membuktikan hasil pengaruh secara simultan. Menurut Ghazali (2016: 98), tujuan koefisien determinasi (R²) pada intinya adalah:

“Koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa secara matematis koefisien determinasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2.100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi ganda

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

1. Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.
2. Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:105) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D mendefinisikan:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel)

sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah pernyataan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Maka H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi BPHTB dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah, secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Untuk mencari nilai t_{hitung} maka pengujian tingkat signifikannya adalah dengan menggunakan rumus yang dikemukakan menurut Sugiyono (2017:230) dalam bukunya yang berjudul Statistika Untuk Penelitian, adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{rp\sqrt{n-3}}{\sqrt{1-rp^2}}$$

Keterangan :

rP = Korelasi Parsial

n = Banyaknya sampel

Setelah menghitung nilai t_{hitung} , selanjutnya bandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan menggunakan kriteria pengujian berikut:

Muhammad Iqbal & Sukma Juniar, Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai $sig < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

Kemudian membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk untuk melihat apakah BPHTB dan Pajak Air Tanah bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011 - 2018. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} .

Menurut Sugiyono (2017:235), F_{hitung} dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien korelasi ganda
 K = Jumlah variabel independen
 n = Jumlah anggota sampel
 dk = $(n-k-1)$ derajat kebebasan.

Setelah itu, gunakan kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh)
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai $sig < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	117.929	132.321		.891
	BPHTB	1.311	1.635	.205	.456
	PAT	45.570	15.359	.758	.031

a. Dependent Variable: PAD

Dari data di atas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah
 X_1 = Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 X_2 = Pajak Air Tanah

$$Y = 117,929 + 1,311 X_1 + 45,570 X_2$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 117.929, Hal ini menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel independen atau BPHTB (X_1) dan Pajak Air Tanah (X_2) nilainya 0, maka PAD (Y) adalah sebesar 117.929.
2. Koefisien regresi Penerimaan BPHTB (X_1) sebesar 1,311, Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah yang artinya jika nilai variabel Penerimaan BPHTB (X_1) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar - 1,311 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi Pajak Air Tanah (X_2) sebesar 45,570, Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah yang artinya jika nilai variabel Pajak Air Tanah

(X_2) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 45,570 dengan asumsi variabel lain tetap.

Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Korelasi Parsial X_1 dengan Y

Correlations				
Control Variables			BPHTB	PAD
PAT	BPHTB	Correlation	1.000	.338
		Significance (2-tailed)	.	.459
		Df	0	5
PAD	Correlation	Correlation	.338	1.000
		Significance (2-tailed)	.459	.
		Df	5	0

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Korelasi Parsial X_2 dengan Y

Correlations				
Control Variables			PAT	PAD
BPHTB	PAT	Correlation	1.000	.799
		Significance (2-tailed)	.	.031
		Df	0	5
PAD	Correlation	Correlation	.799	1.000
		Significance (2-tailed)	.031	.
		Df	5	0

Tabel 4
Hasil Uji Korelasi Ganda (R)

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.914 ^a	.835	.769	106.749051	1.480

a. Predictors: (Constant), PAT, BPHTB

b. Dependent Variable: PAD

Muhammad Iqbal & Sukma Juniar, Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Dilihat dari hasil perhitungan koefisien korelasi diatas, menunjukkan bahwa :

- a. Korelasi parsial antara BPHTB (X_1) dengan PAD (Y) adalah sebesar 0,338, dari nilai yang diperoleh berarti terdapat korelasi positif yang menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut searah, artinya jika BPHTB naik maka PAD akan mengalami kenaikan. Interval koefisien dari perhitungan diatas menunjukkan angka 0,338. Jika melihat interval koefisien angka 0,338 berada diantara 0,20-0,399 yang berarti variabel X_1 mempunyai hubungan yang rendah dengan variabel Y.
- b. Korelasi antara Pajak Air Tanah (X_2) dengan PAD (Y) adalah sebesar 0,799 yang berarti terdapat korelasi positif yang menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut secara searah, Interval koefisien dari perhitungan diatas menunjukkan angka 0,799. Jika melihat interval koefisien angka 0,799 berada diantara 0,60-0,799 yang berarti variabel X_2 mempunyai

hubungan yang kuat dengan variabel Y.

- c. Korelasi ganda antara BPHTB dan Pajak Air Tanah secara simultan dengan PAD adalah sebesar 0,914. Nilai korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara BPHTB dan Pajak Air Tanah terhadap PAD secara simultan adalah searah, artinya jika BPHTB dan Pajak Air Tanah naik, maka PAD pun akan meningkat. Jika melihat pada interval koefisien, angka 0,914 berada di antara 0,80 - 1,000 yang berarti variabel X_1 dan X_2 memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel Y.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1.	.914 ^a	.835	.769	106.749051	1.480

a. Predictors: (Constant), PAT, BPHTB

b. Dependent Variable: PAD

Square)

Dari tabel diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,835. Nilai R Square menunjukkan nilai koefisien determinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai $KD = 0,835$ (83,5%). Artinya, PAD dipengaruhi oleh BPHTB dan Pajak Air Tanah Sebesar 83,5%.

Pengujian Hipotesis

Pengaruh Secara Parsial BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 6
Hasil Uji t (Parsial)
Pengaruh X_1 terhadap Y

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	117.929	132.321		.891	.414
BPHTB	1.311	1.635	.205	.802	.459
PAT	45.570	15.359	.758	2.967	.031

a. Dependent Variable: PAD

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel independen BPHTB (X_1) adalah sebesar 0,802 dengan signifikansi 0,459 sedangkan t_{tabel} dengan dk 5 ($n-3 = 8-3$) adalah 2,570 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} ($0,802 < 2,570$) dan taraf signifikansi (0,459) lebih besar daripada 0,05 maka H_0 diterima H_a ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BPHTB secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung periode 2011-2018.

Pengaruh Secara Parsial Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 7
Hasil Uji t (Parsial)
Pengaruh X_2 terhadap Y

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	117.929	132.321		.891	.414
BPHTB	1.311	1.635	.205	.802	.459
PAT	45.570	15.359	.758	2.967	.031

a. Dependent Variable: PAD

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel independen Pajak Air Tanah (X_2) adalah sebesar 2,967 dengan signifikansi 0,031 sedangkan t_{tabel} dengan dk 5 ($n-3 = 8-3$) adalah 2,570 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($2,967 > 2,570$) dan taraf signifikansi (0,031) lebih kecil daripada 0,050 maka H_0 ditolak H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pajak Air Tanah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung periode 2011-2018.

Pengaruh Secara Simultan BPHTB Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 8

Hasil uji F (Simultan) Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y

ANOVA ^b					
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F
1	Regression	287788.902	2	143894.451	12.627
	Residual	56976.800	5	11395.360	
	Total	344765.701	7		

a. Predictors: (Constant), PAT, BPHTB

b. Dependent Variable: PAD

Dari tabel 8 diatas, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah 12,627, sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 5 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,011, sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 5,79. Karena F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} ($12,627 > 5,79$) dan taraf signifikansi yaitu ($0,011 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen yang terdiri dari BPHTB dan Pajak Air Tanah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung periode 2011-2018.

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya mengenai gambaran serta pengaruh Penerimaan BPHTB dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bandung periode 2011-2018 dapat ditarik esimpulannya sebagai berikut :

1. Dari hasil uji pengaruh parsial antara penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa variabel Penerimaan BPHTB mempunyai hubungan yang rendah dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode 2011-2018. Hal tersebut dipengaruhi adanya wajib pajak yang memanipulasi pembayaran pajak untuk menghindari tarif pajak yang tinggi atau masih adanya wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak tersebut.

2. Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan searah yang sangat kuat dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak air tanah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung periode 2011-2018. Artinya setiap kenaikan penerimaan Pajak Air Tanah disebabkan oleh bertambahnya wajib pajak baru dan banyaknya perusahaan industri di

- Kabupaten Bandung yang memanfaatkan air bawah tanah sebagai bahan penunjang untuk kelangsungan berjalannya perusahaan tersebut.
3. Secara simultan, variabel bebas penerimaan BPHTB dan Pajak Air Tanah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan variabel terikat. Dimana hasil analisis uji simultan menunjukkan hasil perbandingan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} yang menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} ($F_{hitung} > F_{tabel}$).

Saran

Adapun saran dari penulis berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan BPHTB di Kabupaten Bandung sudah cukup baik, namun pengawasan petugas pemungut pajak harus lebih di tingkatkan dengan cara mengawasi secara langsung dan mendata ulang setiap badan atau orang yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak untuk mencegah terjadinya manipulasi dan kecurangan dalam pembayaran pajak tersebut.
2. Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan pajak air tanah di Kabupaten Bandung harus di pertahankan dan di tingkatkan dengan cara mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah kepada setiap orang atau badan yang sudah di kenakan wajib pajak untuk menumbuhkan tingkat kesadaran dalam membayar pajak, dengan hal itu penerimaan pajak air tanah dapat terus meningkat pada setiap tahunnya. Karena penerimaan pajak air tanah cukup berpotensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung.
3. Pencapaian pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung harus di pertahankan dan terus di tingkatkan dengan cara menggali dan memanfaatkan dengan baik sumber-sumber yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah ini tentu sangat tergantung pada peningkatan atas nilai yang ada pada sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri seperti halnya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4. Untuk peneliti selanjutnya di harapkan dapat membahas dan meneliti variabel lain yang tidak diteliti atau

dibahas pada skripsi ini seperti Retribusi Daerah atau Pajak Daerah lain yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. 2012. Perpajakan Pusat dan Daerah. Bandung: Humaniora.
- Fahmi, Irham. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Firdaus. 2009. Pengantar Akuntansi, Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23 Edisi Ke-8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery. 2013. Teori Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Mursyidi. 2010. Akuntansi Dasar. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Murhadi R Warner. 2013. Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Evaluasi Saham. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan. 2009. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta
- Siahaan, Marihot P. 2009. Pajak Daerah & Retribusi Daerah : Rajawali Pers Jakarta
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Bisnis: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Edisi ke-3. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. Statistika Untuk Penelitian. Cetakan ke-29. Bandung: Alfabeta
- Suparmono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan. Jakarta : Andi Publisher
- Waluyo. 2009. Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif Bandung: Refika Aditama.
- Perda No. 1 Tahun 2011 Kabupaten Bandung Tentang Pajak Daerah.
- Perda No. 6 Tahun 2016 Kabupaten Bandung Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah.

UU No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU No 12 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah.